



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Upaya-Upaya Diplomasi Kedutaan Besar Republik
Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur Melalui *Community
Learning Center (CLC)* Dalam Memberikan Akses
Pendidikan Bagi Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia
(PMI)**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

Hana Novia
2016330049

Bandung
2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Upaya-Upaya Diplomasi Kedutaan Besar Republik
Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur Melalui *Community
Learning Center (CLC)* Dalam Memberikan Akses
Pendidikan Bagi Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia
(PMI)**

Skripsi

Oleh:

Hana Novia

2016330049

Pembimbing

Sukawarsini Djelantik, Dra., M.I.S., Ph.D

Bandung
2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Hana Novia
Nomor Pokok : 2016330049
Judul : Upaya-Upaya Diplomasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur Melalui *Community Learning Center* (CLC) Dalam Memberikan Akses Pendidikan Bagi Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 16 Juni 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Sapta Dwikardana, Ph.D.

Sekretaris

Sukawarsini Djelantik, Ph.D. :

Anggota

Sylvia Yazid, Ph.D

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hana Novia

NPM : 2016330049

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya-Upaya Diplomasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur Melalui *Community Learning Center* (CLC) Dalam Memberikan Akses Pendidikan Bagi Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Cirebon, 24 Mei 2020



Hana Novia

ABSTRAK

Nama : Hana Novia

NPM : 2016330049

Judul Skripsi: Upaya-Upaya Diplomasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur Melalui *Community Learning Center* (CLC) Dalam Memberikan Akses Pendidikan Bagi Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana upaya-upaya diplomasi yang dilakukan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur dalam memberikan akses pendidikan bagi anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mayoritas bekerja di perkebunan kelapa sawit Malaysia khususnya wilayah Sabah dan Sarawak melalui *Community Learning Center* (CLC). Berdasarkan kondisi tersebut, maka dibuatlah rumusan penelitian yaitu **“Bagaimana upaya-upaya diplomasi KBRI Kuala Lumpur dalam mewujudkan *Community Learning Center* (CLC) terkait pemenuhan akses pendidikan bagi anak-anak PMI di Malaysia?”** Dalam hal ini, KBRI Kuala Lumpur berperan sebagai perwakilan Republik Indonesia di Malaysia yang menyediakan pelayanan serta perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia, termasuk hak anak-anak PMI dalam memperoleh pendidikan. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, partisipasi dan studi pustaka yang berasal dari buku, jurnal, artikel, laporan resmi, dan berita daring. Penelitian ini mengimplementasikan konsep diplomasi multi jalur yang meliputi jalur pertama atau pemerintah, jalur ketiga atau kelompok bisnis, serta jalur kesembilan yaitu media, lalu menggunakan konsep kebijakan luar negeri untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam skripsi ini. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa KBRI Kuala Lumpur melakukan upaya-upaya diplomasi dengan mendirikan CLC yang merupakan bentuk dari kehadiran negara dalam memenuhi pendidikan anak PMI dimanapun mereka berada.

Kata kunci : Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Indonesia, Malaysia, *Community Learning Center* (CLC), Diplomasi.

ABSTRACT

Name : Hana Novia

NPM : 2016330049

Thesis Title : Diplomatic Efforts of the Embassy of the Republic of Indonesia (KBRI) in Kuala Lumpur through the Community Learning Center (CLC) in Providing Access to Education for Children of Indonesian Migrant Workers (PMI).

The aim of this research is to discuss how diplomatic efforts are undertaken by the Embassy of the Republic of Indonesia in Kuala Lumpur in providing access to education for children of Indonesian Migrant Workers (PMI) through Community Learning Center (CLC). The majority of the migrants are known to work in Malaysian oil palm plantations, especially in Sabah and Sarawak regions. Based on these conditions, the research question arises in this case is "How are the diplomatic efforts of the Embassy of the Republic of Indonesia in Kuala Lumpur in realizing Community Learning Center (CLC) related to fulfilling access to education for Indonesian Migrant Worker (PMI's) children in Malaysia?". In this case, the Indonesian Embassy in Kuala Lumpur plays a role as the representative of the Republic of Indonesia in Malaysia, which provides services and protections for Indonesian Citizens residing in Malaysia including the right of PMI children to obtain an education. The author uses qualitative methods with data collection techniques carried out by observation, interviews, participation and literature review from books, journals, articles, official reports, and online news. This research implements the concept of multi-track diplomacy which includes first track diplomacy or government, third track diplomacy or business group, also ninth track diplomacy is media. Besides, the concept of foreign policy is also applied to answer the research question in this thesis. The result of this study shows that the Indonesian Embassy in Kuala Lumpur has realized diplomacy efforts by establishing CLC. CLC exists as a form of state presence in fulfilling the education of PMI children wherever they are.

Keywords : *the Embassy of the Republic of Indonesia in Kuala Lumpur, Indonesia, Malaysia, Community Learning Center (CLC), Diplomacy*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa (YME) atas berkat dan karunia-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya-Upaya Diplomasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur Melalui *Community Learning Center* (CLC) Dalam Memberikan Akses Pendidikan Bagi Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI)” ini. Adapun penelitian ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar akademik Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Akhir kata, atas segala keterbatasan, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun yang dapat membantu penelitian ini menjadi lebih baik.

Cirebon, 24 Mei 2020



Hana Novia

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak membantu selama mejalani studi di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Intenasional, hingga proses penelitian ini selesai. Secara khusus ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah S.W.T. atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis selama menjalankan studi hingga menyelesaikan penelitian ini.
2. Mbak Sukawarsini Djelantik, Dra., M.I.S., Ph.D selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa memberikan arahan dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima Kasih, Mba Suke, sudah memberikan semangat dan masukan yang sangat berguna bagi penulis.
3. Mama dan Papa yang selalu mendoakan penulis, memberikan kasih sayang tiada henti kepada penulis juga memberikan motivasi dan dukungan baik secara moral maupun materiil kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Sandy, Aldy, Rani, dan Ratna selaku kakak penulis yang selalu memberikan semangat juga dukungannya pada penulis.
5. Ashraf dan Faera selaku keponakan penulis yang selalu mengganggu penulis dalam mengerjakan skripsi sekaligus memberikan canda tawa.

6. Pak Farid selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur Periode 2019-2023 dan Bang Erwinsyah yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data juga informasi penting terkait penelitian penulis.
7. Sahabat terdekat penulis yaitu Lia, Kinta, Chantika, Gemi, Shasqia yang ikut mendoakan penulis juga selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan meyakinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
8. Tuff fams yaitu Juwita, Alifah, Talita, Sabila, Tania, Nadhifa, Ayundha, Tisya, Raidila, dan Jihan selaku selaku teman dekat penulis yang sudah menemani penulis selama berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan, yang sering memberikan semangat untuk menunda-nunda mengerjakan penelitian ini, yang membuat penulis semakin panik dan akhirnya semangat untuk mengerjakan penelitian ini. Terima kasih atas canda tawanya.
9. Sahabat SMA penulis Aulia, Tamara, Okta, Nurul, Guruh, Ragil, Iras, Irus, yang selalu menghibur atas candaannya, dan dukungannya kepada penulis.
10. Terima kasih untuk orang yang penulis anggap spesial dan menganggap penulis spesial juga, siapapun itu.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan untuk segala pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima Kasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dan dukungannya.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Pembatasan Masalah	8
1.2.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4 Kajian Pustaka	10
1.5 Kerangka Pemikiran	13
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	18
1.6.1 Metode Penelitian.....	18
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	18
1.7 Sistematika Pembahasan	19
BAB II PERMASALAHAN AKSES PENDIDIKAN ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)	20
2.1 Situasi dan Kondisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.....	21
2.1.1 Ilegalitas Keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Keluarganya di Malaysia	22
2.1.2 Upah Kerja Yang Rendah	27
2.1.3 Masalah Sosial Yang Timbul.....	31
2.2 Masalah Pendidikan Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI).....	33
2.2.1 Perbedaan Sistem Pendidikan dan Kurikulum.....	34
2.2.2 Minimnya Kemampuan Berbahasa	38
2.3 Pendirian <i>Community Learning Center</i> (CLC) di Malaysia	40

**BAB III UPAYA-UPAYA DIPLOMASI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK
INDONESIA (KBRI) KUALA LUMPUR MENINGKATKAN AKSES
PENDIDIKAN MELALUI *COMMUNITY LEARNING CENTER* (CLC) 47**

- 3.1 Mendirikan *Community Learning Center* (CLC) di Lokasi-Lokasi
Pekerja Migran Indonesia (PMI) 48
- 3.2 Memperluas Akses *Community Learning Center* (CLC) Bagi Peserta
Didik 52
- 3.3 Mendatangkan Guru 60
- 3.4 Melengkapi Sarana dan Prasarana 63
- 3.5 Repatriasi Peserta Didik Untuk Pendidikan Lanjut di Indonesia 69

BAB IV KESIMPULAN 74

Daftar Pustaka 77

- Buku 77
- Jurnal 77
- Dokumen dan Laporan Resmi 78
- Website 80
- Wawancara 81

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Penempatan PMI Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	28
--	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sembilan Jalur Dalam Diplomasi Multi-Jalur	16
Gambar 2.1 Dubes RI untuk Malaysia Genapi Pendirian 50 CLC di Sarawak	44
Gambar 3.1 CLC Rajawali-Derawan (CLC Rader Zone) Sarawak	54
Gambar 3.2 Pemberitaan di Media Sinar Harian Malaysia terkait CLC	57
Gambar 3.3 Peresmian Gedung Baru CLC Wilmar Segarmas Plantation ...	65
Gambar 3.4 Repatriasi Anak-Anak CLC Melanjutkan Sekolah di Indonesia	70

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ADEM	Afirmasi Pendidikan Menengah
ADik	Afirmasi Pendidikan Tinggi
ATDIKBUD	Atase Pendidikan dan Kebudayaan
BNP2TKI	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPS	Badan Pusat Statistik
BPS-KPM	Bahagian Pendidikan Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia
CLC	<i>Community Learning Center</i>
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
JPN	Jabatan Pendaftaran Negara
JPNS	Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak
KBK	Kurikulum Berbasis Kompetensi
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
KEMDIKBUD	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KJRI	Konsulat Jenderal Republik Indonesia
KSSR	Kurikulum Standar Sekolah Dasar
KSSM	Kurikulum Standar Sekolah Menengah
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
NEP	<i>New Economic Policy</i>
PERMENLU	Peraturan Menteri Luar Negeri
PMI	Pekerja Migran Indonesia
RI	Republik Indonesia
SD	Sekolah Dasar
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
SIKK	Sekolah Indonesia Kota Kinabalu
SIKL	Sekolah Indonesia Kuala Lumpur

SILN	Sekolah Indonesia Luar Negeri
SPM	Sijil Pelajaran Malaysia
STPM	Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
UNESCO	United Nation Educational Scientific and Cultural Organization
UNICEF	United Nations Children's Fund
WNA	Warga Negara Asing
WNI	Warga Negara Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga penyebarannya yang kurang merata merupakan faktor yang mempengaruhi manfaat hasil pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di setiap negara. Ketidakseimbangan antara tingginya angka kelahiran dan kematian, mengakibatkan kepadatan penduduk hampir di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi masalah jangka panjang. Akibatnya, jumlah tenaga kerja dalam negeri meningkat secara drastis. Sementara, di Indonesia jumlah lapangan kerja sangat terbatas dan tidak mencukupi untuk menampung jumlah tenaga kerja, dan menyebabkan jumlah pengangguran dalam negeri meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2018 mencapai 7,00 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia mencapai 5,34%.¹

Melihat tingginya angka pengangguran di Indonesia, banyak tenaga kerja yang bermigrasi ke negara lain, salah satunya Malaysia. Pada tahun 2015, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tercatat berangkat ke luar negeri adalah 332.335 orang, dan menurun pada tahun 2016 sebanyak 329.632 orang, jumlah ini

¹ Agustus 2018: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,34 persen, *BPS*, diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1485/agustus-2018--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-34-persen.html>, pada tanggal 4 September 2019

paling banyak ditempatkan di Malaysia yaitu 97.390 orang PMI.² Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap PMI. Bentuk perlindungannya berupa instrumen atau peraturan dan perundangan yang secara khusus diterbitkan sebagai upaya perlindungan, yang selaras dengan berbagai konvensi dan atau deklarasi internasional. Kewajiban pemerintah ini juga didasari kenyataan bahwa selama ini PMI telah menyumbang devisa yang besar bagi negara.³

Malaysia merupakan negara tujuan utama pengiriman PMI bermula sejak penerapan *New Economic Policy* (NEP) di Malaysia pada tahun 1971-1990. *Pull factornya* adalah ketika NEP yang diterapkan oleh Malaysia secara agresif mendukung pembangunan ekonomi yang mengarah pada sektor-sektor industrialisasi dan ekspor.⁴ Dengan adanya kebijakan tersebut menyebabkan peningkatan kebutuhan tenaga kerja untuk dipekerjakan sebagai pekerja bangunan dan pabrik. Kemudian pada tahun 1980-an, sektor pertanian yang berkembang juga memerlukan tambahan tenaga kerja untuk dipekerjakan di perkebunan.⁵ Tingkat pengangguran di Indonesia menjadi *push factor* untuk menutupi

² “Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016”, *Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia* (BNP2TKI), diakses dari http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_08-02-2017_111324_Data-P2TKI_tahun_2016.pdf, pada tanggal 4 September 2019

³ Tita Naovalitha, “Kompleksitas Mekanisme Penempatan BMP ke Luar Negeri: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusinya”, *Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia*, hlm.127

⁴ Sukawarsini Djelantik, “The Indonesian Women Migrant Workers: Redefinition and Termination of Sending Them Abroad”, *International Relations and Diplomacy*, April 2019, Vol. 7, No. 04, 139-149 doi: 10.17265/2328-2134/2019.04.001, pada tanggal 21 Maret 2020

⁵ “The New Economic Policy and Interethnic Relations in Malaysia”, *UNRISD*, diakses dari [http://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf/\(httpPublications\)/A20E9AD6E5BA919780256B6D0057896B?OpenDocument](http://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf/(httpPublications)/A20E9AD6E5BA919780256B6D0057896B?OpenDocument), pada tanggal 4 September 2019

kekurangan tenaga kerja di Malaysia. Kondisi ini menyebabkan PMI mendominasi tenaga kerja asing di Malaysia.

Salah satu dampak negatif dari tingginya jumlah PMI di Malaysia adalah meningkatnya jumlah anak dari PMI. Banyaknya jumlah anak PMI ini termasuk kedalam dampak negatif karena berdasarkan peraturan keimigrasian Malaysia yang mengatur bahwa tenaga kerja non profesional seperti pembantu rumah tangga, buruh konstruksi, pekerja pabrik dan juga pekerja perkebunan atau perladangan sawit tidak boleh menikah bahkan membawa serta keluarganya. Faktanya, banyak diantara para pekerja non profesional tersebut menikah, membawa istri dan keluarganya atau bahkan banyak yang melahirkan anak di Malaysia. Pelanggaran tersebut terjadi karena kontrak kerja para PMI yang panjang yaitu diatas 5 tahun. Selain itu, sesuai dengan syarat dan ketentuan perekrutan pekerja asing di Malaysia, usia pekerja yang diperbolehkan adalah tidak kurang dari 18 tahun dan tidak lebih dari 45 tahun pada saat melamar.⁶

Usia 18-45 tahun merupakan usia produktif tenaga kerja termasuk dalam berkebutuhan untuk berkeluarga. Namun, pada praktiknya tidak sedikit PMI yang mendatangkan anak dan istrinya ke Malaysia tanpa izin tinggal yang sah. Selain itu, ada pula yang melakukan pernikahan dengan sesama Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun dengan Warga Negara Asing (WNA) lainnya secara siri atau tidak tercatat untuk menjaga agar visanya tetap berlaku. Permasalahan menjadi kompleks karena tidak hanya terkait dengan hak dan kewajiban sebagai pekerja,

⁶ "Foreign Worker", *Immigration Department of Malaysia*, diakses dari <https://www.imi.gov.my/index.php/en/foreign-worker.html>, pada tanggal 19 Agustus 2019

terdapat pula hak dan kewajiban sebagai WNI. Akibatnya yang menjadi korban adalah anak-anak PMI yang posisinya menjadi *non-procedural*, dimana mereka tidak memiliki dokumen yang sah dan tidak diakui keberadaannya di Malaysia. Kondisi ini yang menyebabkan banyak anak-anak Indonesia di wilayah Sabah yang diperkirakan ada sekitar 53.000 anak, Sarawak 3.000 anak dan Johor Bahru serta wilayah Semenanjung 2.000 anak yang membutuhkan akses dan layanan pendidikan dasar.⁷Anak-anak PMI di Malaysia membentuk masalah baru yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui diplomasi.

Minimnya sarana pendidikan serta tuntutan perekonomian memaksa anak-anak PMI untuk bekerja membantu orang tuanya demi memenuhi kebutuhan keluarga, yang berdampak pada sulitnya anak-anak PMI ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sedangkan para anak-anak tersebut memiliki hak atas akses pendidikan dasar. Upaya pemerintah RI dalam menyediakan layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di wilayah Sabah, Malaysia diawali dengan adanya kesepakatan Kepala Negara Indonesia dan Malaysia pada Annual Consultation 2006 mengenai pendirian *Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK)*. Sementara, layanan pendidikan dasar bagi anak-anak PMI yang umumnya bekerja di perladangan atau perkebunan kelapa sawit Sabah dilakukan oleh LSM *Humana Child Aid Society* yang melayani 7.796 anak.⁸ Melihat banyaknya jumlah anak-anak Indonesia yang belum terlayani pendidikan, maka didirikanlah Pusat

⁷Ari Purbayanto, *Buku Profil Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Community Learning Center (CLC) untuk Mendidik Anak-Anak Indonesia di Malaysia Timur*. (KBRI Kuala Lumpur, 2018)

⁸*Ibid.*

Kegiatan Belajar Masyarakat atau lebih dikenal dengan nama *Community Learning Center (CLC)*.⁹ Melalui proses diplomasi berupa negosiasi yang relatif panjang antara perwakilan Republik Indonesia (RI) di Malaysia yaitu KBRI Kuala Lumpur dengan pemerintah Malaysia sejak 2004 sampai dengan saat ini.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan PMI mulai muncul ketika NEP mulai diterapkan di Malaysia tahun 1971-1990. Pada saat itu, Malaysia membuka lebar kedatangan pekerja migran, sehingga jumlah calon PMI meningkat drastis. Pada tahun 2018, PMI sebagian besar bekerja pada sektor domestik yaitu sebanyak 75.311 orang atau 29%, pengasuh sebanyak 51.386 orang atau 19%, operator sebanyak 36.005 orang atau 14%, dan pekerja perkebunan sebanyak 25.108 orang atau 10%.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis akan terfokuskan pada PMI yang bekerja di perkebunan atau ladang-ladang kelapa sawit Malaysia. Dampak dari peningkatan jumlah PMI adalah memberikan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ikut serta dalam proses pengiriman PMI ke Malaysia. Keberadaan PMI ilegal di Malaysia menimbulkan banyak persoalan, seperti upah PMI menjadi sangat murah, tidak terjamin asuransi, dan tidak terproteksi. Selain itu, banyak PMI yang melanggar peraturan keimigrasian Malaysia yaitu ketika para PMI tersebut menikah, membawa istri dan keluarganya atau bahkan banyak yang melahirkan

⁹ Ari Purbayanto, *Buku Profil Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Community Learning Center (CLC) untuk Mendidik Anak-Anak Indonesia di Malaysia Timur*, op.cit

¹⁰ “Laporan Kinerja Tahun 2018”, *BNP2TKI*, diakses http://www.bnp2tki.go.id/uploads/publikasi/images/data_30-08-2019_LAPORAN_KINERJA_BNP2T_KI_TAHUN_2018.pdf, pada tanggal 20 Maret 2020

anak di Malaysia. Anak-anak dari PMI tersebut membawa persoalan baru bagi perwakilan RI di Malaysia.

Tantangannya adalah ketika anak-anak PMI rentan terkena dampak eksploitasi. Pemberian akses pendidikan bagi WNI terlepas dari status legal atau ilegalnya harus dilakukan untuk mencegah potensi permasalahan sosial yang terjadi di masa yang akan datang. Keterbatasan pendidikan dan ekonomi yang membuat para PMI harus bermigrasi ke Malaysia yang kemudian berdampak pada keluarga khususnya anak-anak PMI tersebut. Apabila anak-anak PMI tidak memperoleh akses pendidikan yang layak maka di masa mendatang akan menjadi sumber tenaga kerja yang murah dan rentan eksploitasi.¹¹ Pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik bagi para anak-anak Indonesia. Untuk itu pelayanan pendidikan sudah seharusnya menjadi prioritas dalam konteks perlindungan WNI di luar negeri secara komprehensif. Tantangan-tantangan tersebut umumnya dihadapi oleh sebagian besar Perwakilan RI, termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur.

Sejak KBRI Kuala Lumpur ditetapkan sebagai pusat Pelayanan Warga berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) No.4 Tahun 2008 Pasal 1, staf KBRI dituntut untuk meningkatkan perlindungan bagi semua WNI termasuk PMI. KBRI Kuala Lumpur juga secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah RI secara keseluruhan di negara

¹¹ Stella Aleida Hutagalung dan Veto Tyas Indrio, “Tema 3: Akses Perempuan Buruh Migran Luar Negeri terhadap Layanan Perlindungan”, *SMERU*, diakses dari http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/mamputhematic3_id.pdf, pada tanggal 16 Januari 2020

penerima.¹² Anak-anak dari PMI tersebut juga merupakan bagian dari WNI yang harus diberikan perlindungan, akses dan mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Akses pendidikan dasar sangat penting bagi anak-anak PMI, dikarenakan setiap anak-anak Indonesia memiliki hak atas pendidikan yang layak sekalipun berada diluar negeri.

Peran KBRI Kuala Lumpur sangat penting dalam memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak PMI di Malaysia dan dibutuhkan kemahiran dan ketegasan posisi tawar menawar (negosiasi) melalui diplomasi. Dalam memberikan akses pendidikan dasar kepada anak-anak PMI yang harus mendapatkan haknya. Melihat banyaknya jumlah anak-anak Indonesia yang belum dapat mengakses pendidikan, maka didirikanlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau lebih dikenal dengan nama *Community Learning Center (CLC)*. Untuk mencapai tahap dimana anak-anak PMI mendapatkan akses pendidikan dibutuhkan perjuangan oleh pemerintah Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur terkait pendirian CLC diberbagai wilayah di Malaysia. KBRI Kuala Lumpur terus berusaha dalam meningkatkan jumlah CLC demi memenuhi hak pendidikan anak-anak PMI, sehingga pemerintah Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur beberapa kali melakukan pertemuan dengan pemerintah Malaysia dalam rangka membahas pentingnya mendirikan sekolah bagi anak-anak yang orang tuanya bekerja di perkebunan kelapa sawit Malaysia. Pendirian CLC juga berhubungan dengan

¹² “Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri”, *Menteri Luar Negeri Republik Indonesia*, diakses dari https://pih.kemlu.go.id/files/Permenlu_04_Tahun_2008_Pelayanan_Warga_pd_Perwakilan_RI.pdf, pada tanggal 23 Agustus 2019

salah satu tugas Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Kuala Lumpur yaitu untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang pendidikan dan mengikuti pertemuan mengenai pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, WNI termasuk PMI dan anak-anaknya dimanapun berada harus tetap terjamin perlindungannya, dan dalam mewujudkan hal tersebut terutama terkait dengan persoalan PMI di luar negeri bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada tahun 2011-2018. Tahun 2011 dipilih dengan alasan pendirian CLC pertama kali disepakati oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia pada 20 Oktober 2011 di wilayah Sabah. Pendirian CLC ini melalui proses negosiasi yang relatif panjang antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, dan terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan jumlah CLC. Penelitian diakhiri di tahun 2018 karena telah menunjukkan jumlah CLC yang meningkat tajam yaitu bertambahnya CLC di Sabah yang berjumlah 154 CLC (110 CLC SD dan 44 CLC SMP) dan 54 CLC di wilayah Sarawak.¹³

Pendirian CLC ini menjadi salah satu bentuk pencapaian oleh KBRI Kuala Lumpur dalam memenuhi hak anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan dasar. Malaysia dipilih dalam penelitian ini karena dari segi jumlah pengiriman PMI merupakan terbesar pertama di Asia Tenggara, namun dari akses pemenuhan pendidikan anak-anak PMI relatif minim. Berdasarkan data dari Konsulat Jenderal

¹³ Ari Purbayanto, “*Momerandum Akhir Tugas*”, Atase Pendidikan dan Kebudayaan (2014-2018) Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur Malaysia, 2018, hlm. 10

Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu bahwa anak-anak Indonesia yang berada di Sabah berkisar 53.000 anak dan Sarawak 3.000 anak.¹⁴ Melihat banyaknya jumlah anak-anak PMI di Sabah dan Sarawak, maka KBRI Kuala Lumpur terus berupaya dalam memperluas akses CLC di Sabah dan Sarawak agar anak-anak PMI dapat mengakses pendidikan dasar.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka inti dari penelitian dapat dijabarkan dalam pertanyaan sebagai berikut: **“Bagaimana upaya-upaya diplomasi KBRI Kuala Lumpur dalam mewujudkan *Community Learning Center* (CLC) terkait pemenuhan akses pendidikan bagi anak-anak PMI di Malaysia?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui upaya-upaya diplomasi antara KBRI Kuala Lumpur dengan pemerintah Malaysia terkait dengan pemenuhan akses pendidikan anak-anak PMI melalui *Community Learning Center* (CLC).

¹⁴ Ari Purbayanto, *Buku Profil Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Community Learning Center (CLC) untuk Mendidik Anak-Anak Indonesia di Malaysia Timur*, op.cit

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan teori-teori Hubungan Internasional. Penelitian ini memberikan kontribusi pada dunia akademik bahwa diplomasi multi jalur terutama jalur pertama atau pemerintah, jalur ketiga atau kelompok bisnis, dan jalur kesembilan atau media ikut berkontribusi dalam pemenuhan akses pendidikan anak-anak PMI. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi yang tertarik untuk mendalami upaya-upaya diplomasi KBRI Kuala Lumpur dalam memenuhi akses pendidikan bagi anak-anak PMI di Malaysia melalui *Community Learning Center* (CLC).

1.4 Kajian Pustaka

Terdapat beberapa kajian yang relevan terhadap penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga sumber utama yang dijadikan pedoman penelitian bagi penulis. Sumber pertama adalah buku yang berjudul “*Kuntum Bunga Bangsa di Ladang Sawit Malaysia*” yang disusun oleh Ineu Rahmawati, penerbit IPB Press, tahun 2018. Buku ini berfokus pada pendidikan anak Indonesia di Sarawak. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara termasuk bagi anak Indonesia yang berada di Malaysia.¹⁵ Penulis menjelaskan bahwa Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur membantu memberikan akses pelayanan pendidikan yang terfokuskan pada konsep “*education for all*”, yang kemudian

¹⁵ Ineu Rahmawati, *Kuntum Bunga Bangsa di Ladang Sawit Malaysia*, (Bogor: IPB Press, 2018), hlm. 46-47

diterapkan di CLC Sarawak, bahwa setiap anak memiliki hak yang sama tidak memandang latar belakang status ekonomi dan budaya dalam memperoleh akses pendidikan.¹⁶

Sementara, sumber kedua yaitu artikel yang berjudul “*Basic Education and Human Security*” yang ditulis oleh Amartya Sen yang membahas keterkaitan antara pendidikan dasar dan *human security*. Literatur ini merupakan bagian dari *Working Paper Commission on Human Security The United Nations Children's Fund* (UNICEF) yang diterbitkan pada tahun 2002. Artikel yang disusun oleh Amartya Sen berfokus pada pendidikan dasar yang mempengaruhi keamanan manusia. Pendidikan dasar menjadi bagian dari pusat keamanan manusia diikuti dengan beberapa alasan, yang pertama yaitu pendidikan dasar sangat penting dalam membantu orang untuk mendapatkan pekerjaan, dan kualitas seseorang yang berpendidikan akan sangat diperhatikan. Kedua, kemampuan orang buta huruf dalam memahami dan menggunakan hak-hak hukumnya akan sangat terbatas. Ketiga, buta huruf dapat mengurangi suara politik yang akan berkontribusi langsung terhadap ketidakamanan seseorang.¹⁷

Artikel ketiga berjudul “*Representation Community Learning Center As The Alternative Learning Program In Johor Bahru Malaysia*” yang dimuat pada Jurnal Ilmiah Kependidikan Vol. 5 No. 2 ditulis oleh Endang Sondari dan Yulia Sofiani Zaimar pada tahun 2018. Artikel ini membahas mengenai anak-anak PMI

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Amartya Sen, “Basic Education and Human Security”, Background paper for the workshop on Basic Education and Human Security. *Jointly organized by the Commission on Human Security, UNICEF, the Harvard University, Kolkata, 2-4 January 2002*

di Malaysia yang harus mendapatkan pendidikan yang lebih baik melalui CLC. Hak anak-anak tidak hanya untuk pendidikan, tetapi untuk pengembangan sistem pendidikan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Johor Bahru pada tahun 2015 yaitu membuat konsep ruang sekolah untuk membuat sistem pembelajaran yang berbeda untuk anak-anak PMI di CLC. CLC menggunakan kurikulum bahasa Indonesia, meskipun dibangun di Malaysia, CLC adalah milik pemerintah Indonesia.¹⁸

Dari beberapa literatur tersebut, secara umum penulis menyetujui bahwa pendidikan sangat penting, melalui pendidikan kehidupan seseorang akan menjadi lebih baik dan setiap individu pun akan semakin berkualitas. Namun dari ketiga artikel diatas, masih belum ditemukan pembahasan upaya-upaya diplomasi yang dilakukan KBRI Kuala Lumpur dalam mendirikan CLC bagi anak-anak PMI. Artikel pertama hanya terfokuskan pada pendidikan anak-anak PMI di Sarawak saja. Artikel kedua hanya membahas mengenai pentingnya pendidikan dasar yang berhubungan dengan tingkat keamanan manusia, sehingga terlalu terfokuskan pada faktor keamanan manusia. Kemudian artikel ketiga terfokuskan pada CLC di Johor Bahru tanpa adanya penjelasan bagaimana CLC dapat terbentuk. Dari seluruh kelebihan dan keterbatasan ketiga tulisan diatas, maka dapat dijustifikasikan jika penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang orisinal. Karena dari ketiga kajian pustaka diatas belum ada yang membahas ataupun meneliti upaya-upaya diplomasi KBRI Kuala Lumpur dengan pemerintah

¹⁸ Endang Sondari dan Yulia Sofiani Zaimar, "Representation Community Learning Center As The Alternative Learning Program In Johor Baru Malaysia", *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 5 No. 2, hlm. 107-114

Malaysia dalam mewujudkan CLC untuk memenuhi akses pendidikan anak-anak PMI di Malaysia khususnya Sabah dan Sarawak. Berdasarkan ketiga sumber yang sudah dijelaskan penulis akan memfokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur melalui pendidikan saja, dan lebih terfokuskan pada upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam pembentukan CLC.

1.5 Kerangka Pemikiran

Ilmu hubungan internasional merupakan sebuah kajian mengenai hubungan interaksi sosial dan politik yang tercipta tidak hanya pada aktor negara melainkan juga pada individu.¹⁹ Dalam dunia internasional, hubungan baik antara satu negara dengan negara lainnya merupakan hal yang penting untuk dipertahankan. Dengan memiliki hubungan yang baik, akan memberikan dampak positif bagi suatu negara, seperti dalam pencapaian kepentingan nasional. Hubungan bilateral yang dijalin antar dua negara tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara yang mendasarinya untuk melakukan kerjasama. Untuk mewujudkan kepentingan nasional, sebuah negara perlu untuk merumuskan kebijakan luar negeri.

Mark R. Amstutz dalam bukunya yang berjudul “*International Ethics: Concepts, Theories, and cases in Global Politics*” mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai *explicit and of governmental officials designed to promote national interests beyond a country's territorial boundaries*. Dalam definisi ini ada tiga

¹⁹ Martin Griffiths, Terry O' Callaghan, dan Steven C. Roach, *International Relations: The Key Concept*, (New York: Routledge, 2002), vii

tekanan utama yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan menekankan pada tindakan dari pejabat pemerintah untuk merancang kepentingan nasional tersebut, melampaui batas-batas teritorial suatu negara. Dengan demikian semua kebijakan pemerintah yang membawa dampak bagi aktor lain dari luar batas wilayahnya secara konseptual merupakan bagian dari kepentingan kebijakan luar negeri.²⁰

Sedangkan, definisi yang diberikan oleh Jack C Plano dan Roy Olton menekankan bahwa setiap kebijakan luar negeri dirancang untuk menjangkau kepentingan nasional.²¹ Kepentingan nasional yang hendak dijangkau melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta kekuatan yang dimiliki untuk menjangkaunya.²² Tujuan dirancang, dipilih, dan ditetapkan oleh pembuat keputusan dan dikendalikan untuk mengubah kebijakan (*revisionist policy*) atau mempertahankan kebijakan (*status quo policy*) di lingkungan internasional.²³ Kebijakan luar negeri memiliki kaitan erat dengan diplomasi.

Diplomasi merupakan salah satu cara negara untuk melakukan interaksi guna membangun hubungan baik dengan negara lain dan mencapai kepentingan nasionalnya. Melalui diplomasi, negara dapat memperoleh kekuatan dan pengaruh

²⁰ Mark R. Amstutz, “*International Ethics: Concepts, Theories, and cases in Global Politics Fourth Edition*”, (Boulder: Rowman and Littlefield, 2013) hlm. 18.

²¹ Jack C Plano dan Roy Olton, *The International Relations Dictionary Third Edition* (Santa Barbara: Western Michigan University, 1982), hlm. 6

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

di dunia internasional tanpa menekankan upaya-upaya militer. Diplomasi pada umumnya merupakan komunikasi digunakan diplomat dalam mempromosikan kebijakan luar negeri suatu negara melalui persetujuan formal dan persetujuan tertentu.²⁴ Sir Ernest Satow menjelaskan dalam bukunya *A Guide to Diplomatic Practice*, bahwa diplomasi merupakan penerapan kemampuan, pengetahuan, kecerdasan dan kebijaksanaan pemerintah dalam menjalin hubungan dengan pemerintah negara lain.²⁵ Dalam interaksi tersebut diplomasi digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuannya dan memperoleh dukungan dari negara lain atas prinsip dan keputusan yang diambilnya. Diplomasi dianggap sebagai suatu kemampuan bagi pemerintah untuk mencegah dan mengurangi konflik internasional.²⁶

Diplomasi memiliki sebuah konsep yang biasa disebut diplomasi multi-jalur. Dalam konsep ini, terdapat jaringan kegiatan yang saling berhubungan antar negara, individu, lembaga, dan komunitas yang beroperasi bersama untuk tujuan bersama.²⁷ Diplomasi multi-jalur merupakan konsep diplomasi yang dikembangkan dan dipraktikkan oleh Louise Diamond dan John W. McDonald, salah satu pendiri *Institute for Multi-Track Diplomacy*, yang membagi diplomasi multi-jalur ke dalam 9 jalur diplomasi berbeda:

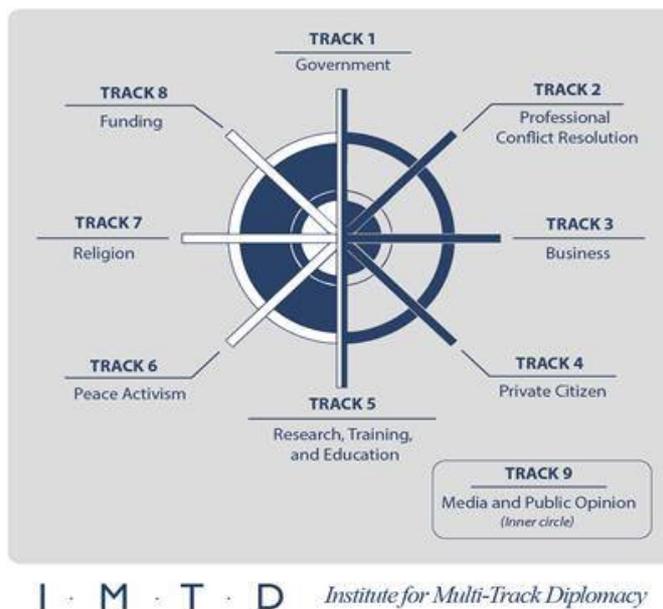
²⁴ G.R Berridge, *Diplomacy: Theory and Practice*, (London: Palgrave Macmillan, 2010), hal.1

²⁵ Sir E. Satow, *A Guide to Diplomatic Practice*, (Longmans, Green & Co. London & New York, 1917)

²⁶ *Ibid*

²⁷“What is Multi-track diplomacy”, *Institute Multi-Track Diplomacy*, diakses dari <http://imtd.org/about/what-is-multi-track-diplomacy/>, pada tanggal 25 Februari 2020

Gambar 1.1 Sembilan Jalur Dalam Diplomasi Multi-Jalur



Sumber: *Institute for Multi-Track Diplomacy, What is Multi-Track*
(<http://imtd.org/about/what-is-multi-track-diplomacy/>)

Gambar 1.1 menunjukkan sembilan jalur dalam diplomasi multijalur. Jalur pertama mewakili pemerintah, sementara jalur kedua mewakili non-pemerintah/professional, selanjutnya jalur ketiga adalah jalur bisnis, dan jalur keempat adalah jalur individu atau melalui keterlibatan pribadi.²⁸ Jalur yang kelima adalah penelitian, pelatihan, dan pendidikan, sedangkan jalur keenam adalah aktivisme atau melalui advokasi dan jalur ketujuh adalah agama. Jalur kedelapan adalah pendanaan atau penyediaan sumber daya, sementara jalur terkahir adalah jalur kesembilan yaitu komunikasi dan media.²⁹

²⁸ "What is Multi-track diplomacy", *op.cit*

²⁹ *Ibid.*

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada jalur pertama, ketiga, dan kesembilan. Diplomasi jalur pertama yaitu diplomasi yang bersifat resmi dan digunakan dengan aspek formal dan proses-proses dalam pemerintahan. Jalur pemerintahan ini dilakukan oleh presiden dan petinggi-petinggi pemerintahan negara yang lainnya.³⁰ Jalur ketiga yang mewakili bidang bisnis dan pengaruhnya yang aktual juga potensial terhadap pembangunan perdamaian melalui penyediaan peluang ekonomi, persahabatan internasional, dan pemahaman saluran komunikasi informal.³¹ Jalur kesembilan yaitu ranah suara rakyat dan bagaimana opini publik dibentuk dan diekspresikan oleh media-cetak, film, video, radio, elektronik.³²

Teori diplomasi ini akan dipergunakan penulis untuk menjelaskan aktor-aktor yang berperan dalam diplomasi antara pemerintah Indonesia dan Malaysia terkait pemenuhan pendidikan anak-anak PMI melalui CLC, terutama jalur pertama, ketiga, dan kesembilan. Teori diplomasi juga digunakan dalam menjelaskan bagaimana pemerintah RI beserta KBRI Kuala Lumpur melakukan negosiasi dalam rangka pemenuhan akses pendidikan anak PMI. Sementara, teori kebijakan luar negeri digunakan untuk menjelaskan kebijakan yang dipilih pemerintah RI terkait CLC.

³⁰ Dr. Louise Diamond dan John McDonald. *Multi-Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace Third Edition*. (West Hartford, CT: Kumarian Press, 1996)

³¹ "Multi Track Diplomacy", Netuni, diakses dari http://www.netuni.nl/courses/conflict1/week3/3.6_week.html, pada tanggal 14 April 2020

³² "What is Multi-track diplomacy", *op.cit*

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan deskriptif, karena penelitian ini bermaksud untuk memahami, mengungkap dan menjelaskan berbagai gambaran atas fenomena-fenomena yang ada dilapangan kemudian dirangkum menjadi kesimpulan deskriptif melalui kata-kata tertulis maupun lisan dari individu-individu dan perilaku yang diamati dalam penelitian.³³ Kedalaman penelitian menjadi ciri utama dan keunggulan dalam penelitian kualitatif.³⁴

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data melalui sumber primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh penulis melalui observasi, wawancara, partisipasi, dan penelitian lapangan hasil kerja magang penulis di KBRI Kuala Lumpur. Sementara data sekunder diperoleh penulis dari buku, jurnal, surat kabar, dan majalah. Data tersier diperoleh melalui internet, berupa artikel-artikel. Kegiatan pengumpulan data tersebut dilakukan penulis untuk memberikan data-data yang akurat dan komprehensif mengenai topik penelitian ini.

³³ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2007), hlm.9

³⁴ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010) hlm.1-2

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan akan disusun sebagai berikut; **Bab 1** membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika pembahasan. Selanjutnya, di **Bab 2** dijelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terbatasnya akses pendidikan bagi anak-anak PMI, yang mayoritas orang tuanya bekerja pada sektor perkebunan kelapa sawit. Kemudian, pada **Bab 3** penulis akan menjelaskan tentang upaya-upaya diplomasi KBRI Kuala Lumpur dalam pemenuhan akses pendidikan bagi anak PMI melalui CLC. **Bab 4** kesimpulan.

